

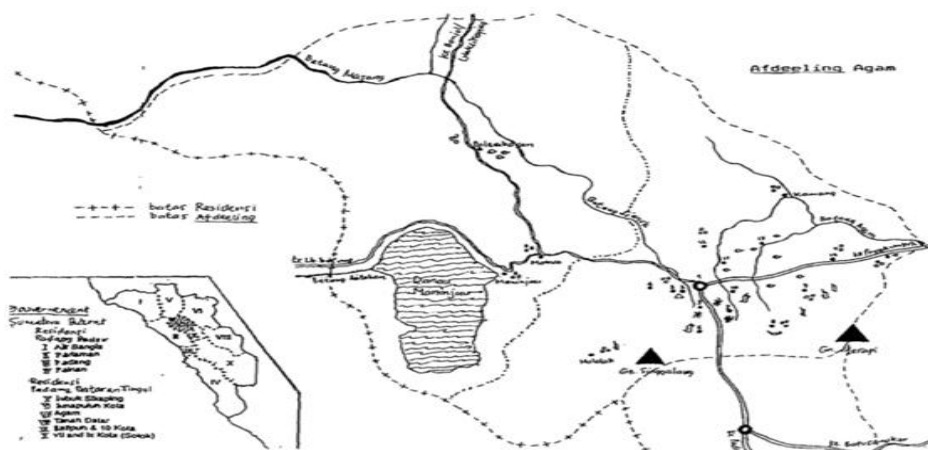
BAB III

PERANG KAMANG 1908

A. Letak Geografis daerah Kamang Tahun 1908

Kamang merupakan salah satu wilayah nagari yang berada di bagian Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Secara geografi, Kamang berada di daerah daratan tinggi di Minangkabau yang dikelilingi bukit barisan. Wilayah Kamang memiliki kontur tanah yang berbukit, dengan lembah subur dan udara sejuk yang berada di daratan tinggi sekitar 900-1000 meter di atas permukaan laut. Kesuburan daerah Kamang ini menjadikannya sebagai daerah pertanian yang sangat bagus dari zaman Hindia Belanda sampai saat sekarang.¹

Gambar 3.1 Peta Afdeling Agam²



¹ Abdus Shomadal-Karawang, *Perang Kamang 1908: Perlawanan Tali Tigo Sapilin Terhadap Penerapan Belasting Di Minangkabau*, Scribd, 2024

² Zulqayim Boekitinggi Tempo Doeloe , Hlm 71

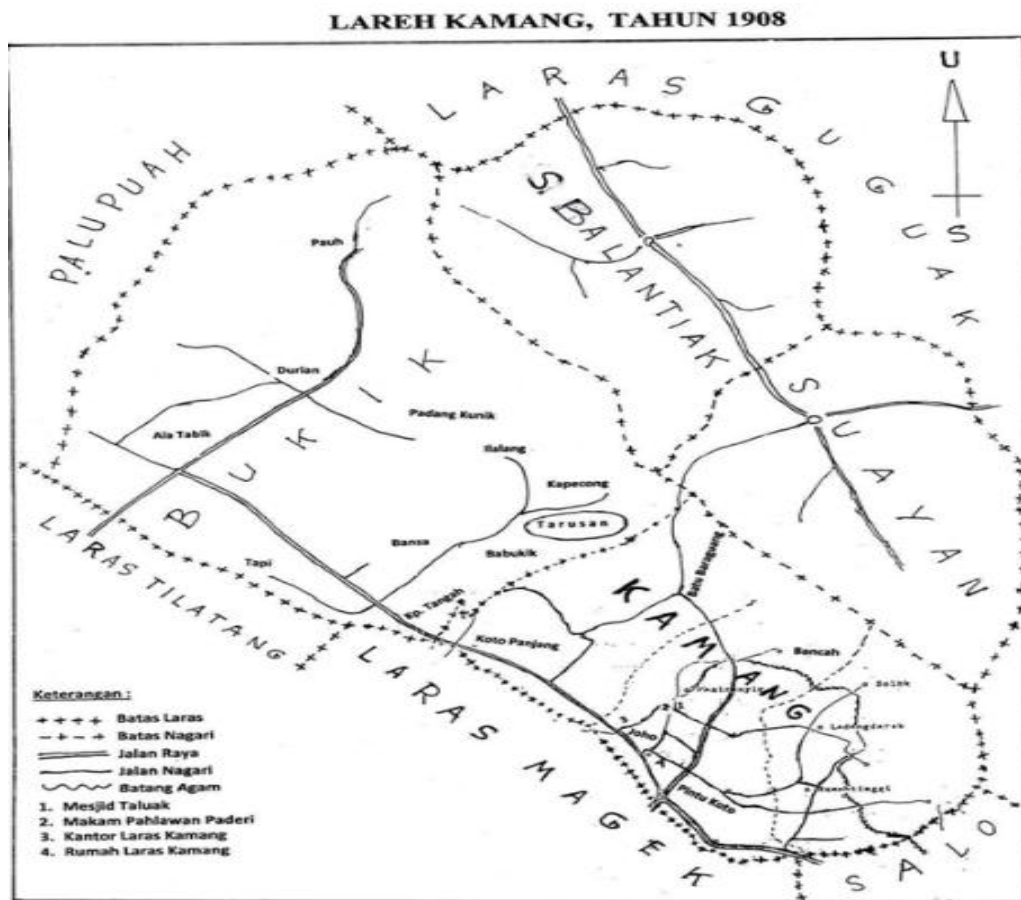
Pada abad ke 20 tahun 1908 masa kolonial Hindia Belanda demi mempermudah administratif di wilayah Minangkabau. Daerah Kamang sebuah nagari yang terletak dalam wilayah Agam Tuo yaitu Order Afdeling Agam Tuo yang berpusat di Fort De Kock (Bukittinggi) yang berfungsi sebagai pusat kekuasaan militer kolonial Belanda dan sipil kolonial Padangsche bovenlanden. Kedudukan kolonial yang berada di Fort De Kock yang secara wilayah relatif dekat dengan Kamang menjadikan wilayah ini cukup intensif diawasi dari aspek politik, sosial dan ekonomi.

Kondisi geografi tersebut membuat kedudukan daerah Kamang strategis dalam tata ruang pemerintahan kolonial Belanda di luhak Agam pada awal abad ke 20. Daerah Kamang yang terletak pada daratan tinggi dengan kesuburan tanah yang baik dalam pertanian tidak hanya menjadikan Kamang daerah agraria, tetapi juga wilayah yang bernilai sebagai penghasil ekonomi bagi pemerintahan kolonial Belanda. menjadikan Kamang dalam pengawasan kolonial Belanda secara peraturan dan administratif yang berorientasi pada pengawasan dan pengendalian.

Batas wilayah Kamang secara geografis pada tahun 1908 mengacu kepada pembagian wilayah yang telah ada pada sistem adat Minangkabau yaitu sistem nagari. Pembatasan ini tidak hanya mengacu pada geografis alam seperti perbukitan, kawasan hutan dan sungai tetapi juga atas dasar adat dan hukum tradisional yang dipimpin oleh penghulu-penghulu yang tergabung dalam

kerapatan adat nagari. Secara administrasi berfungsi mempermudah kolonial dalam mengendalikan dan kebijakan kolonial secara ekonomi, politik dan sosial.

Gambar 3.2 Peta Perang Kamang³



Wilayah Kamang pada tahun 1908 berbatasan dengan beberapa wilayah yaitu pada bagian utara yang berbatasan dengan wilayah distrik Maninjau yang menjadi jalur dengan danau Maninjau dan pesisir barat Sumatra Barat. Bagian selatan berbatasan dengan kawasan pusat Fort de Kock yang mempermudah

³ [Abdusshomadal-Karawangi, Sejarah Perang Kamang 1908 | PDF](#), Hlm 1

kebijakan administratif kolonial Belanda. bagian barat Kamang berbatasan dengan bukit barisan yang terbentuk secara alami dan pada bagian timur berbatasan daerah Kelarasan Tilatang dan juga daerah agraris yang memiliki kesamaan karakter secara ekonomi dan sosial.⁴

Kondisi geografis Kamang yang agraris sangat memengaruhi struktur sosial masyarakatnya. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada sektor pertanian, dengan sistem kepemilikan tanah yang diatur berdasarkan adat Minangkabau. Tanah ulayat menjadi basis ekonomi dan identitas sosial masyarakat, sehingga setiap kebijakan kolonial yang berkaitan dengan pajak tanah dan hasil pertanian memicu resistensi dari masyarakat. Selain itu, kondisi geografis yang relatif terpencil di beberapa bagian wilayah Kamang memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Jarak antar pemukiman yang dipisahkan oleh perbukitan dan lembah menyebabkan masyarakat mengembangkan sistem gotong royong yang kuat dalam mengelola sumber daya alam dan menghadapi tantangan bersama.

Dalam konteks Perang Kamang 1908, kondisi geografis wilayah ini memainkan peran yang sangat penting. Medan yang berbukit dan dipenuhi vegetasi lebat menyulitkan pergerakan pasukan kolonial, sementara masyarakat lokal yang telah mengenal medan dengan baik mampu memanfaatkan kondisi tersebut sebagai strategi perlawanan. Jalur-jalur sempit dan medan terjal menjadi faktor yang

⁴ Masyitah, Dra., Bedriati Ibrahim, M.Si, And Drs. Ridwan Melay, M.Hum. *The Kamang War In 1908 (The People's Movement Toward The Dutch)*. History Education Studies Program, Faculty Of Teacher Training And Education, University Of Riau. Jomfkip – Ur, 2019. Hlm 110

memperlambat mobilisasi pasukan kolonial dan memberikan keuntungan taktis bagi masyarakat Kamang.⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi geografis Kamang pada tahun 1908 tidak hanya membentuk pola kehidupan masyarakat secara sosial dan ekonomi, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam dinamika konflik antara masyarakat Kamang dan pemerintah kolonial Belanda. Letak yang strategis, kesuburan tanah, serta kondisi alam yang mendukung pertahanan alami menjadikan Kamang sebagai wilayah yang memiliki posisi penting dalam sejarah perlawanan rakyat Minangkabau terhadap kolonialisme Belanda.⁶

B. Latar Belakang Perang Kamang

Perang Kamang merupakan salah satu peristiwa perlawanan rakyat terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang terjadi pada 15 Juni 1908 di Nagari Kamang, wilayah Agam, Sumatera Barat kini termasuk Kecamatan Kamang Magek. Pada masa awal kekuasaan kolonial Belanda di Minangkabau, pemungutan pajak dilakukan melalui pajak hasil bumi, khususnya pajak kopi. Pajak kopi diberlakukan karena kopi merupakan komoditas utama yang bernilai tinggi bagi kepentingan ekonomi kolonial. Dalam sistem ini, masyarakat diwajibkan menanam kopi dan menyerahkan sebagian hasil panen atau menjualnya kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditetapkan. Pemungutan pajak dilakukan secara

⁵ Nagari Kamang Darussalam. “*Sejarah Pemerintahan – Nagari Kamang Darussalam.*” Kamang Darussalam Wordpress. Diakses 4 Januari 2026. Hlm 32.

⁶ Universitas Andalas, *Bab I: Pendahuluan*, Skripsi, Universitas Andalas, [Http://Scholar.Unand.Ac.Id/66269/2/Bab%20i.Pdf](http://Scholar.Unand.Ac.Id/66269/2/Bab%20i.Pdf).

kolektif melalui struktur adat seperti nagari dan laras, sehingga beban pajak masih bersifat komunal dan ditanggung bersama oleh masyarakat nagari berdasarkan mekanisme adat, serta belum menimbulkan tekanan langsung terhadap individu karena tanggung jawab pajak dilekatkan pada kesatuan sosial nagari.

**Gambar 3.3 Urutan Peringkat Laras Penghasil Kopi di
Onderafdeeling Agam Tua Tahun 1869/1871-1888⁷**

**Urutan Peringkat Laras Penghasil Kopi
di *Onderafdeeling* Agam Tua
Tahun 1869/1871-1888**

No.	Nama Laras	1863/71	1872/74	1874/77	1878/80	1881/83	1884	1887	1888	Jumlah/pikul
1.	IV Koto	4.323	3.024	4.747	3.722	3.917	2.693	2.883	2.409	27.718
2.	Candung	4.944	4.944	4.777	4.090	3.825	2.024	2.432	2.319	27.005
3.	Tilatang	3.728	1.929	3.795	3.128	3.497	2.577	1.971	1.772	22.397
4.	Bahuhampu	3.355	1.620	2.470	2.328	2.859	1.567	1.398	1.268	16.865
5.	Baso	2.522	2.031	2.781	2.116	2.310	1.387	1.370	1.658	16.205
6.	Kamang	1.936	1.431	1.431	998	1.247	1.175	809	750	9.318
Jumlah		30.838	12.038	16.382	16.382	17.655	11.423	10.863	9.976	119.508

⁷ Opcit Hlm 57

Gambar 3.4 Daerah – Daerah Di *Bovenlanden* Penghasil Kopi Paling Banyak

Tiap Tahun⁸

*Daerah-daerah di bovenlanden
yang Selama 25 tahun Menghasilkan Kopi
Paling Banyak Rata-rata Tiap Tahun*

Dalam pikul	1863/71	1872/74	1875/77	1878/80	1881/83	1884	1887	1888
Nama Lareh								
Saningbakar	10359	9150	5841	6185	7944	6376	7060	6810
Kotolaweh	5683	4968	6534	3851	4308	4272	4502	4776
Limokaum	5992	5235	5821	3498	3178	1250	664	3405
Candung	4944	2594	4777	4080	3625	2024	2432	2319
IV-Koto/Oud Agam	4323	3024	4747	3722	3917	2693	2883	2409
Raorao	3735	2551	3104	2163	2932	1609	1285	1924
Salimpang	2579	2416	3525	3193	3604	1535	2036	2433
Sungaitarab	2952	2643	3426	2621	3135	1893	1357	2247
Tilatang	3728	1929	3795	3128	3457	2577	1971	1772
VIII-Koto	3096	2220	2348	1731	2256	2414	2126	1796
Kotoanau	2055	2363	2635	1869	1937	1786	1757	2880
Pariangan	3214	2857	2594	1603	1494	793	491	1711
Banuaampu	3355	1620	2470	2328	2859	1567	1386	1268
Supayang	2754	1983	2550	2365	2184	951	—	1759
Gurun	2231	1673	2445	2363	2375	1059	1045	2348
Baso	2552	2031	2781	2116	2310	1387	1370	1638
IV-Koto/Matua	2678	1756	1959	971	1528	1536	1374	1444
Halaban	2783	1158	1467	762	2335	1857	1347	1260

Nama Lareh	1863/71	1872/74	1875/77	1878/80	1881/83	1884	1887	1888
Solok	2256	1700	2136	1633	1823	1374	2059	2538
Situjuh/L-Koto	1447	1025	1268	1072	1753	1507	1821	1556
Guguk	2571	983	1371	851	1304	965	630	661
Sumpur	2089	1672	1685	1373	949	817	801	804
Sumanik	2185	1286	1437	972	1397	743	503	1059
IV Angkat	2294	1419	2382	1787	1595	676	522	588
Lintau	2785	1341	1014	601	669	391	330	544
Tanjung	1945	1352	1509	959	1170	784	505	1111
Sungaijambu	1405	1216	1567	1507	1407	894	505	1136
Tanjungbalit	1926	1273	1323	931	961	530	226	38
Suliki	1486	1117	1528	900	1134	686	728	1007
Sirukan	1769	1224	1583	1107	870	415	—	1163
Kamang	1936	840	1431	998	1247	1175	809	750
Mungkar	2068	654	879	703	1063	775	338	248
Singkarak	1902	1346	1276	824	709	288	173	283
Matua	1691	783	1052	691	721	712	693	548

— tidak ada angkanya

Wilayah Kamang dikenal sebagai kawasan dataran tinggi yang subur dan cocok untuk budidaya kopi, sehingga masuk dalam pengawasan ketat pemerintah kolonial Belanda. Produksi kopi dari Kamang menjadi bagian dari jaringan ekonomi kolonial di Onderafdeeling Agam Tua, di mana hasil kopi rakyat dijadikan komoditas utama untuk kepentingan ekspor. Kondisi ini menyebabkan masyarakat Kamang tidak hanya dibebani kewajiban tanam dan setor kopi, tetapi juga diawasi secara administratif melalui struktur laras dan aparat kolonial. Ketergantungan Belanda terhadap hasil kopi Kamang inilah yang membuat penerapan tanam paksa

⁸ Rusli Amran, *Sumatra Barat Plakat Panjang* hlm 352

tumbuhan kopi di wilayah ini, sehingga tekanan ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat Kamang.⁹

Namun, memasuki akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, pemerintah kolonial mulai melakukan perubahan kebijakan fiskal. Tekanan ekonomi yang terus meningkat, disertai dengan pengawasan ketat aparat kolonial, menciptakan suasana ketidakpastian dan ketegangan psikologis di tengah masyarakat Kamang. Kondisi ini memunculkan rasa tertekan dan ketidakadilan yang dirasakan secara kolektif oleh rakyat nagari. Pajak kopi yang bersifat kolektif secara bertahap digantikan atau dilengkapi dengan pajak individu (*hoofdelijke belasting*). Pajak individu ini dikenakan langsung kepada setiap laki-laki dewasa tanpa memperhitungkan kondisi ekonomi masing-masing.

Dengan demikian, pajak tidak lagi dibebankan pada hasil produksi, tetapi pada individu sebagai subjek pajak.¹⁰ Kebijakan tersebut dipandang memberatkan rakyat, terutama masyarakat agraris, serta bertentangan dengan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan adat istiadat masyarakat Minangkabau yang menempatkan musyawarah dan keadilan sebagai dasar kehidupan bersama. Perang Kamang tidak dapat dilepaskan dari konteks kebijakan kolonial Belanda pada awal abad ke-20 yang semakin memperkuat kontrol administratif dan ekonomi terhadap masyarakat pribumi. Setelah penghapusan sistem tanam paksa, pemerintah kolonial menerapkan sistem pajak langsung yang harus dibayar oleh setiap rumah tangga

⁹ Zulqayim, *Bukittinggi Tempo Doeloe*, (Padang: Andalas University Press, 2006), Hlm. 71

¹⁰ Zulqayim, *Ibid*, Hlm. 57.

tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi rakyat. Kebijakan ini menimbulkan tekanan ekonomi yang besar, khususnya bagi petani kecil di Nagari Kamang yang menggantungkan hidup pada hasil pertanian subsisten.¹¹

Selain berdampak pada aspek ekonomi, penerapan pajak langsung juga membawa konsekuensi sosial dan politik. Pemerintah kolonial mulai mengurangi peran pemimpin adat dan penghulu nagari dalam pengambilan keputusan, sehingga kewenangan pemerintahan adat semakin terpinggirkan. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, nagari merupakan kesatuan sosial, adat, dan politik yang memiliki otonomi tersendiri. Oleh karena itu, kebijakan kolonial yang mengabaikan struktur nagari dipahami sebagai ancaman terhadap eksistensi kolektif masyarakat Kamang. Dalam sistem sosial Minangkabau, penghulu memiliki posisi penting sebagai pemimpin kaum dan penjaga adat. Intervensi kolonial ini dipahami sebagai bentuk pelemahan terhadap kedaulatan nagari dan pelanggaran terhadap tatanan adat yang telah lama berlaku. Akumulasi tekanan ekonomi dan marginalisasi struktur adat tersebut menimbulkan ketegangan sosial yang semakin meningkat di tengah masyarakat Kamang.

Buku *Islam dan Praksis Kultural Masyarakat Minangkabau* karya Irshash A. Shamad dan Danil Mahmud Chaniago memberikan kerangka penting dalam memahami bagaimana peristiwa sejarah, termasuk Perang Kamang, tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keislaman dan adat yang hidup dalam masyarakat

¹¹ Helma, Fitri. *Perang Kamang 1908 Dalam Tulisan Orang Minang: Sebuah Kajian Historiografis*. Diss. Universitas Andalas, 2022. Hlm 45-65

Minangkabau. Dalam masyarakat Kamang, Islam dan adat bukanlah dua unsur yang berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan dalam membentuk cara pandang, sikap, dan ingatan kolektif terhadap peristiwa sejarah. Dalam konteks Perang Kamang tahun 1908, nilai-nilai Islam yang terinternalisasi dalam adat Minangkabau berperan besar dalam membentuk ingatan kolektif masyarakat Kamang.

Perlawanan terhadap kebijakan pajak kolonial Belanda dipahami tidak hanya sebagai reaksi ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Pandangan ini sejalan dengan konsep *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* yang dijelaskan oleh Irshash A. Shamad dan Danil Mahmud Chaniago, di mana adat dan Islam menjadi landasan moral dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Ingatan kolektif masyarakat Kamang terhadap Perang Kamang kemudian dilestarikan melalui praksis kultural yang sarat dengan nilai-nilai Islam, seperti cerita lisan yang disampaikan oleh tokoh adat dan alim ulama, nasihat adat yang bernuansa religius, serta penghormatan terhadap tokoh-tokoh perjuangan melalui ziarah makam dan peringatan tertentu. Praksis-praksis ini menunjukkan bahwa pelestarian ingatan kolektif tidak hanya berlangsung dalam ranah sejarah formal, tetapi juga melalui aktivitas keagamaan dan adat yang terus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.¹²

¹² Irshash A. Shamad Dan Danil Mahmud Chaniago, *Islam Dan Praksis Kultural Masyarakat Minangkabau* (Palembang: Noer Fikri Offset, 2022). Hlm 13

Dengan demikian, buku *Islam dan Praksis Kultural Masyarakat Minangkabau* membantu memperjelas bahwa pelestarian ingatan kolektif Perang Kamang tidak terlepas dari integrasi Islam dan adat dalam masyarakat Kamang. Perang Kamang menjadi bagian dari memori kolektif yang hidup, dijaga, dan diwariskan melalui nilai-nilai keislaman dan budaya Minangkabau yang masih kuat hingga saat ini. Ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan kolonial tidak lagi dapat disalurkan melalui jalur musyawarah, karena keputusan-keputusan penting ditentukan secara sepihak oleh pemerintah kolonial. Kondisi ini mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif di kalangan masyarakat untuk melakukan perlawanan sebagai bentuk pembelaan terhadap hak dan martabat nagari.

Puncak dari ketegangan tersebut terjadi pada 15 Juni 1908, ketika rakyat Kamang melakukan perlawanan terbuka terhadap aparat kolonial Hindia Belanda. Perlawanan ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk petani, ulama, dan tokoh adat, serta berlangsung secara kolektif tanpa organisasi militer modern. Meskipun perlawanan ini akhirnya dapat dipadamkan oleh Belanda, Perang Kamang tetap memiliki arti penting sebagai simbol penolakan rakyat Minangkabau terhadap penindasan kolonial dan upaya mempertahankan nilai-nilai adat serta kedaulatan sosial nagari.¹³

Dalam peristiwa perlawanan tersebut, peran tokoh-tokoh agama dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menggerakkan solidaritas rakyat

¹³ Amcnews, “*Perang Kamang Tahun 1908, Perlawanan Rakyat Atas Penindasan Belanda*,” Amcnews, 15 Juni 2021. Hlm 52

Kamang. Salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar adalah Haji Abdul Manan, seorang ulama yang dihormati dan memiliki kedudukan moral yang kuat di tengah masyarakat. Keberadaan Haji Abdul Manan memperkuat legitimasi perlawanan rakyat, karena penolakan terhadap kebijakan kolonial tidak hanya dipahami sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan keadilan dan moral yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan adat.

Pemerintah kolonial Hindia Belanda memandang Haji Abdul Manan sebagai figur yang berpotensi membahayakan stabilitas kekuasaan kolonial di wilayah Kamang. Oleh karena itu, aparat kolonial berupaya melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang dianggap berperan dalam membangkitkan semangat perlawanan rakyat. Namun, dalam situasi perlawanan yang berlangsung cepat dan melibatkan massa secara luas, upaya tersebut tidak sepenuhnya berhasil melemahkan perlawanan rakyat pada saat itu. Meskipun demikian, ketimpangan kekuatan militer antara rakyat Kamang dan pasukan kolonial menjadi faktor penentu berakhirnya perlawanan. Pasukan Belanda yang dilengkapi senjata modern dan organisasi militer yang terstruktur mampu memukul mundur rakyat yang hanya menggunakan senjata tradisional. Akibatnya,¹⁴ perlawanan rakyat Kamang dapat dipadamkan dalam waktu relatif singkat, disertai dengan jatuhnya korban jiwa di pihak rakyat serta penangkapan terhadap sejumlah tokoh masyarakat.

¹⁴ Masyitah, Dra., Bedriati Ibrahim, M.Si, Dan Drs. Ridwan Melay, M.Hum. *The Kamang War In 1908 (The People's Movement Toward The Dutch)*. History Education Studies Program, Faculty Of Teacher Training And Education, University Of Riau. 2019. Hlm 65

Setelah peristiwa tersebut, pemerintah kolonial memperketat pengawasan terhadap Nagari Kamang dan wilayah sekitarnya. Langkah-langkah represif dilakukan untuk mencegah munculnya perlawanan serupa di kemudian hari, termasuk pengawasan terhadap aktivitas tokoh adat dan agama. Dengan demikian, Perang Kamang 1908 secara faktual berakhir, namun dampak sosial dan psikologisnya tetap membekas dalam kehidupan masyarakat Kamang. Perang Kamang tidak hanya meninggalkan jejak sebagai peristiwa konflik bersenjata, tetapi juga menjadi bagian penting dalam sejarah lokal Minangkabau. Ingatan tentang perlawanan tersebut terus diwariskan dalam bentuk cerita lisan dan memori sosial masyarakat, sebagai simbol keberanian dan penolakan terhadap ketidakadilan kolonial. Oleh karena itu, Perang Kamang 1908 memiliki arti penting tidak hanya dalam konteks sejarah kolonial, tetapi juga dalam pembentukan identitas dan kesadaran kolektif masyarakat Kamang hingga masa berikutnya.¹⁵

C. Jalannya Perang Kamang

Puncak perlawanan rakyat Kamang terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda terjadi pada 15 Juni 1908, sebagai akumulasi dari ketegangan sosial, ekonomi, dan politik yang telah berlangsung sebelumnya. Dengan demikian, Perang Kamang tidak hanya menjadi peristiwa historis, tetapi juga menjadi pengalaman kolektif yang membekas secara emosional dan sosial dalam kehidupan masyarakat Kamang, yang kemudian diwariskan sebagai ingatan kolektif lintas

¹⁵ Von Benda-Beckmann, Franz, And Keebet Von Benda-Beckmann. *Transformasi Politik Dan Hukum: Nagari Di Sumatra Barat Dari Kolonisasi Ke Desentralisasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021. Hlm 180

generasi. Pada hari tersebut, masyarakat Kamang yang terdiri dari petani, ulama, dan tokoh adat melakukan perlawanan secara terbuka terhadap aparat kolonial. Perlawanan ini tidak disusun melalui organisasi militer modern, melainkan tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat nagari yang merasa hak dan martabatnya terancam oleh kebijakan kolonial.

Buku karya Haji Rijal Abdul Hafiz dan Prof. Awis merupakan salah satu sumber tertulis penting dalam mengkaji Perang Kamang, khususnya dalam memahami bagaimana peristiwa tersebut direkam dan diingat oleh masyarakat Kamang. Buku ini tidak hanya memaparkan kronologi Perang Kamang sebagai perlawanan masyarakat terhadap kebijakan pajak kolonial Belanda pada tahun 1908, tetapi juga menggambarkan latar sosial, adat, dan semangat kolektif masyarakat Kamang dalam menghadapi kekuasaan kolonial.

Dalam konteks penelitian ini, buku tersebut memiliki peran penting sebagai media pelestarian ingatan kolektif. Narasi yang disusun oleh Haji Rijal Abdul Hafiz dan Prof. Awis merepresentasikan ingatan masyarakat Kamang yang sebelumnya berkembang melalui tradisi lisan, kemudian dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Proses ini menunjukkan adanya transformasi ingatan kolektif dari lisan ke tulisan, sehingga memori tentang Perang Kamang dapat diwariskan secara lebih luas dan lintas generasi. Selain itu, buku ini menekankan nilai-nilai perjuangan, keberanian, solidaritas, dan semangat anti-penindasan yang melekat dalam ingatan kolektif masyarakat Kamang. Tokoh-tokoh lokal dan peran masyarakat adat yang diangkat dalam buku tersebut menjadi simbol perjuangan yang terus hidup dalam kesadaran

masyarakat Kamang hingga saat ini. Hal ini memperlihatkan bahwa Perang Kamang tidak hanya dipahami sebagai peristiwa sejarah semata, tetapi juga sebagai bagian dari identitas kolektif masyarakat.

Dengan demikian, buku karya Haji Rijal Abdul Hafiz dan Prof. Awis dapat diposisikan sebagai sumber sejarah tertulis sekaligus sarana pelestarian ingatan kolektif masyarakat Kamang. Keberadaan buku ini memperkuat ingatan sosial masyarakat terhadap Perang Kamang dan berkontribusi dalam menjaga kesinambungan memori sejarah di tengah perubahan zaman.¹⁶ Perlawanan rakyat Kamang berlangsung secara spontan dan melibatkan partisipasi massa. Bentuk perlawanan ini mencerminkan karakter perlawanan rakyat nagari, di mana solidaritas sosial dan ikatan adat menjadi kekuatan utama. Rakyat bergerak berdasarkan kesepahaman bersama untuk menolak kebijakan kolonial, tanpa adanya komando terpusat atau struktur kepemimpinan militer yang formal. Hal ini menunjukkan bahwa Perang Kamang merupakan perlawanan sosial yang berakar kuat pada dinamika masyarakat nagari.¹⁷

Dalam menghadapi aparat kolonial, rakyat Kamang menggunakan senjata tradisional seperti parang, tombak, serta alat-alat pertanian yang dimodifikasi sebagai senjata. Penggunaan senjata tersebut memperlihatkan keterbatasan sarana dan teknologi militer yang dimiliki rakyat. Sebaliknya, pasukan kolonial Belanda

¹⁶ Haji Rijal Abdul Hafiz Dan Awis, *Perang Kamang: Perlawanan Masyarakat Kamang Terhadap Kolonial Belanda Tahun 1908* (Padang: Pustaka Minangkabau, 2015), Hlm. 45–47.

¹⁷ Fitri, Helma, Gusti Asnan, And Nopriyasman Nopriyasman. "Historiografi Perang Kamang 1908: Kategorisasi Penulisan Oleh Orang Minang." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9.10 (2022): Hlm 3699-3712.

menghadapi perlawanan tersebut dengan persenjataan modern dan pelatihan militer yang terorganisasi. Ketimpangan kekuatan ini menjadi faktor utama yang menyebabkan perlawanan rakyat Kamang dapat dipadamkan dalam waktu relatif singkat. Kekalahan rakyat Kamang dalam peristiwa Perang Kamang 1908 tidak hanya meninggalkan dampak secara fisik dan politik, tetapi juga menimbulkan pengaruh sosial dan psikologis yang mendalam bagi masyarakat.

Peristiwa tersebut menghadirkan pengalaman traumatis kolektif akibat jatuhnya korban jiwa, penangkapan tokoh-tokoh masyarakat, serta tindakan represif pemerintah kolonial pasca perlawanan. Trauma dan rasa kehilangan ini kemudian membentuk sikap kehati-hatian, kewaspadaan, serta solidaritas internal di tengah masyarakat Kamang. Ingatan terhadap penderitaan bersama tersebut menjadi bagian dari pengalaman sosial yang terus diingat dan diwariskan, sehingga Perang Kamang tidak hanya dikenang sebagai kekalahan militer, tetapi juga sebagai simbol pengorbanan dan penderitaan kolektif dalam menghadapi ketidakadilan kolonial. Meskipun perlawanan tersebut berakhir dengan kekalahan secara militer, Perang Kamang memiliki makna historis yang penting. Peristiwa ini mencerminkan keberanian rakyat nagari dalam menghadapi kekuasaan kolonial yang jauh lebih kuat. Perlawanan rakyat Kamang merupakan ekspresi penolakan terhadap kebijakan kolonial yang dianggap tidak adil serta mencederai martabat dan kedaulatan nagari.

Dengan demikian, Perang Kamang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konflik bersenjata, melainkan sebagai bentuk perlawanan sosial dan moral

masyarakat Minangkabau terhadap penindasan kolonial. Peristiwa ini menegaskan adanya kesadaran kolektif rakyat Kamang untuk mempertahankan nilai-nilai adat, keadilan, dan kehormatan nagari, yang kemudian menjadi bagian penting dalam sejarah lokal Minangkabau dan membentuk ingatan kolektif masyarakat hingga masa berikutnya. Perang Kamang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang cukup besar di pihak rakyat. Banyak masyarakat Kamang yang gugur dalam perlawanan tersebut akibat ketimpangan kekuatan antara rakyat dan pasukan kolonial. Selain korban jiwa, pemerintah kolonial juga melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh masyarakat yang dianggap terlibat atau memiliki pengaruh dalam peristiwa perlawanan tersebut. Penangkapan ini disertai dengan pemberian sanksi administratif maupun tindakan represif lainnya sebagai bentuk penegasan kekuasaan kolonial di wilayah Kamang.¹⁸

Pasca terjadinya Perang Kamang, pemerintah kolonial Hindia Belanda memperketat pengawasan terhadap Nagari Kamang dan daerah sekitarnya. Pengawasan tersebut dilakukan melalui peningkatan kontrol administratif serta pemantauan terhadap aktivitas tokoh adat dan tokoh agama. Langkah ini bertujuan untuk mencegah munculnya kembali perlawanan rakyat yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan kolonial. Dalam konteks ini, kehidupan sosial masyarakat nagari berada di bawah tekanan dan pembatasan yang lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Meskipun secara militer rakyat Kamang mengalami kekalahan,

¹⁸ Lionar, Uun, Agus Mulyana, And Leli Yulifar. "Plakat Panjang Hingga Perang Kamang: Gerakan Rakyat Minangkabau Menentang Pajak Kolonial Belanda." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5.2 (2020): Hlm 113-122.

Perang Kamang memiliki makna historis yang penting dalam perjalanan sejarah masyarakat Minangkabau. Peristiwa ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif masyarakat nagari untuk mempertahankan keadilan, adat, dan kedaulatan sosial dari tekanan kolonial. Perlawanan tersebut lahir bukan semata-mata karena dorongan emosional, melainkan sebagai respons terhadap ketidakadilan struktural yang dirasakan secara bersama oleh masyarakat.¹⁹

Oleh karena itu, Perang Kamang tidak dapat dipahami hanya sebagai konflik bersenjata antara rakyat dan pemerintah kolonial. Peristiwa ini merupakan bagian dari dinamika sosial-politik masyarakat Minangkabau pada masa kolonial, yang mencerminkan pertentangan antara sistem kekuasaan kolonial dengan nilai-nilai adat dan tatanan sosial nagari. Dalam konteks ini, Perang Kamang menjadi simbol perjuangan masyarakat lokal dalam mempertahankan martabat, identitas, dan hak-haknya di bawah tekanan kolonialisme.

Dengan demikian, Perang Kamang 1908 tidak berhenti sebagai peristiwa sejarah yang selesai pada saat perlawanan dipadamkan, melainkan berlanjut dalam bentuk ingatan sosial yang hidup di tengah masyarakat Kamang. Pengalaman perlawanan, penderitaan, serta nilai-nilai keberanian dan solidaritas yang lahir dari peristiwa tersebut kemudian diwariskan melalui cerita lisan, praktik adat, simbol, dan penamaan tempat yang berkaitan dengan Perang Kamang. Proses pewarisan ini menunjukkan bahwa Perang Kamang telah menjadi bagian dari memori kolektif

¹⁹ Atikurrahman, Moh, Et Al. "Sejarah Pemberontakan Dalam Tiga Bab: Modernitas, Belasting, Dan Kolonialisme Dalam Sitti Nurbaya." *Suluk: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya* 3.1 (2021): Hlm 1-22.

masyarakat Kamang, yang tidak hanya merekam peristiwa masa lalu, tetapi juga membentuk identitas sosial, nilai perlawanan, dan kesadaran historis masyarakat hingga masa kini. Oleh karena itu, kajian mengenai bagaimana Perang Kamang diingat dan dimaknai dalam ingatan kolektif masyarakat Kamang menjadi penting untuk memahami hubungan antara peristiwa sejarah dan pembentukan identitas sosial masyarakat lokal.

D. Dampak Perang Kamang

Perang Kamang 1908 membawa dampak yang luas dan mendalam bagi kehidupan masyarakat Nagari Kamang. Dampak tersebut tidak hanya bersifat langsung dan material, tetapi juga bersifat jangka panjang yang memengaruhi struktur sosial, ekonomi, politik, serta psikologis masyarakat. Peristiwa ini menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah lokal Kamang pada masa kolonial Hindia Belanda, karena mengubah pola hubungan antara masyarakat nagari dan kekuasaan kolonial yang sebelumnya masih menyisakan ruang negosiasi adat. Dari segi sosial, Perang Kamang mengakibatkan terganggunya tatanan kehidupan masyarakat nagari. Jatuhnya korban jiwa di pihak rakyat serta penangkapan terhadap tokoh adat dan tokoh agama menyebabkan terjadinya kekosongan peran sosial dalam masyarakat. Tokoh-tokoh yang sebelumnya berfungsi sebagai pemimpin kaum, penasehat adat, dan pemersatu masyarakat mengalami

pembatasan ruang gerak akibat pengawasan kolonial, sehingga mekanisme sosial berbasis adat tidak dapat berjalan secara optimal sebagaimana sebelumnya.²⁰

Kondisi tersebut berdampak pada melemahnya solidaritas sosial yang sebelumnya terbangun kuat dalam sistem nagari. Masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam berinteraksi dan cenderung menghindari sikap terbuka terhadap kebijakan kolonial. Rasa takut dan trauma akibat tindakan represif aparat kolonial menciptakan perubahan pola komunikasi sosial, di mana sikap diam dan kepatuhan terpaksa menjadi strategi bertahan hidup bagi sebagian masyarakat Kamang. Selain itu, dampak sosial Perang Kamang juga tercermin dalam perubahan relasi kekuasaan di tingkat nagari. Pemerintah kolonial semakin memperkuat kontrol administratif dan membatasi peran lembaga adat sebagai pusat pengambilan keputusan. Hal ini menandai pergeseran dari tatanan sosial yang berbasis musyawarah dan kepemimpinan adat menuju sistem kekuasaan yang bersifat sentralistik dan represif. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial masyarakat pada masa itu, tetapi juga meninggalkan jejak historis yang membentuk ingatan kolektif masyarakat Kamang hingga generasi berikutnya.²¹

Selain itu, tindakan represif pemerintah kolonial pasca-perang menciptakan suasana ketakutan yang meluas di tengah masyarakat Kamang. Rasa takut ini memengaruhi pola interaksi sosial, di mana masyarakat menjadi lebih tertutup,

²⁰ Zikri, Afanov. *Babaliak Ka Nagari: Pemerintahan Nagari Kamang Hilir 1983-2005*. Diss. Universitas Andalas, 2020. Hlm 34

²¹ Sya'ban, Anwar. "Studi Terhadap Peran Parik Paga Nagari Dalam Pemerintahan Di Nagari Kamang Mudiak." *Kata Pengantar*: Hlm186.

berhati-hati dalam berbicara, dan enggan menunjukkan sikap terbuka terhadap kebijakan kolonial.²² Setiap bentuk pertemuan adat maupun kegiatan sosial diawasi secara ketat, sehingga ruang ekspresi masyarakat semakin menyempit. Kondisi ini menciptakan atmosfer sosial yang penuh kecurigaan dan menekan kebebasan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Hubungan antara masyarakat nagari dan kekuasaan kolonial semakin bersifat hierarkis dan timpang. Pemerintah kolonial menempatkan diri sebagai otoritas mutlak, sementara masyarakat nagari diposisikan sebagai pihak yang harus tunduk dan patuh. Lembaga adat yang sebelumnya memiliki kewenangan besar dalam mengatur kehidupan sosial perlahan kehilangan peran strategisnya. Ketimpangan relasi kekuasaan ini memperlemah posisi tawar masyarakat dalam menghadapi kebijakan kolonial, khususnya yang berkaitan dengan pajak, tanah, dan kewajiban kerja. Dalam bidang ekonomi, Perang Kamang berdampak langsung pada kehidupan agraris masyarakat. Konflik bersenjata dan tindakan represif menyebabkan aktivitas pertanian terganggu, bahkan terhenti dalam waktu tertentu. Banyak petani tidak dapat mengolah sawah dan ladang mereka secara optimal karena situasi keamanan yang tidak kondusif serta kekhawatiran akan tindakan aparat kolonial. Akibatnya, produksi pangan mengalami penurunan yang signifikan dan memengaruhi ketahanan ekonomi rumah tangga masyarakat nagari.²³

²² Putra, Naufal Ananda. "Perang Padri Dalam Perspektif Strukturalisme Konflik." *Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam 1* (2024): Hlm 233-243.

²³ Fajrini, Fani. *Pengaruh Kunjungan Objek Pariwisata Tarusan Terhadap Perekonomian Masyarakat Jorong Halalang Kec. Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Penurunan hasil pertanian tersebut berdampak lebih lanjut pada kesejahteraan masyarakat Kamang. Keterbatasan hasil panen menyebabkan berkurangnya cadangan pangan dan meningkatnya beban ekonomi keluarga. Di sisi lain, kewajiban pajak dan pungutan kolonial tetap diberlakukan tanpa mempertimbangkan kondisi pasca-konflik. Hal ini memperparah tekanan ekonomi masyarakat dan memperkuat persepsi bahwa kebijakan kolonial bersifat eksploitatif serta tidak berpihak pada kepentingan rakyat nagari.

Bagi masyarakat Kamang yang mayoritas bergantung pada pertanian subsisten, kondisi pasca-Perang Kamang 1908 memperparah tekanan ekonomi yang telah ada akibat kebijakan pajak langsung (*belasting*). Penurunan hasil pertanian yang disebabkan oleh konflik dan gangguan keamanan membuat masyarakat semakin kesulitan memenuhi kewajiban ekonomi kepada pemerintah kolonial. Situasi ini menempatkan petani dalam posisi yang rentan, karena penghasilan yang terbatas harus dibagi untuk kebutuhan hidup sekaligus memenuhi tuntutan pajak yang bersifat memaksa.

Pasca-perang, pemerintah kolonial justru memperketat pemungutan pajak dan pengawasan ekonomi terhadap masyarakat nagari. Kebijakan tersebut diterapkan dengan tujuan memastikan stabilitas pendapatan kolonial sekaligus mencegah munculnya kembali perlawanan rakyat. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini tidak mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kamang yang masih dalam tahap pemulihan pasca-konflik. Akibatnya, beban

ekonomi masyarakat tidak berkurang, bahkan cenderung semakin meningkat.²⁴ Dampak dari kebijakan tersebut adalah melemahnya kemandirian ekonomi nagari. Masyarakat Kamang semakin bergantung pada sistem ekonomi kolonial, baik melalui mekanisme pajak, kerja paksa, maupun pengawasan terhadap hasil pertanian. Ketergantungan ini secara perlahan mengikis sistem ekonomi berbasis adat dan gotong royong yang sebelumnya menjadi penopang utama kehidupan masyarakat nagari. Dalam jangka panjang, kondisi ini memperdalam ketimpangan ekonomi antara masyarakat lokal dan penguasa kolonial.

Dari aspek politik dan administratif, Perang Kamang dijadikan legitimasi oleh pemerintah kolonial untuk memperkuat kontrol terhadap Nagari Kamang. Sistem pemerintahan adat semakin dipinggirkan, sementara kekuasaan administratif kolonial diperluas melalui pengawasan ketat dan intervensi langsung dalam urusan nagari. Peran penghulu dan tokoh adat dalam pengambilan keputusan publik mengalami pembatasan yang signifikan, sehingga kedaulatan politik nagari berangsur-angsur tergantikan oleh struktur kekuasaan kolonial yang bersifat sentralistik dan represif.

Peristiwa Perang Kamang 1908 menunjukkan adanya perubahan strategi pemerintah kolonial dalam menghadapi perlawanan rakyat. Pemerintah kolonial tidak lagi semata-mata mengandalkan kekuatan militer terbuka, tetapi mulai mengombinasikannya dengan penguatan sistem birokrasi, pengawasan sosial, serta

²⁴ Lubis, Sabina Aurel Divani. *Perlawanan Mandeh Siti Terhadap Kebijakan Ekonomi Belanda Dalam Penerapan Belasting Di Manggopoh Sumatera Barat 1908*. Diss. Universitas Jambi, 2025. Hlm 30-50

kontrol terhadap tokoh-tokoh berpengaruh di tingkat nagari. Strategi ini bertujuan untuk menekan potensi perlawanan sejak dini dengan cara mengendalikan struktur sosial dan politik masyarakat dari dalam. Penguatan birokrasi kolonial pasca-perang diwujudkan melalui peningkatan peran aparat administratif dan pengawasan ketat terhadap aktivitas masyarakat.²⁵ Setiap bentuk pertemuan adat, kegiatan keagamaan, maupun aktivitas sosial lainnya berada dalam pengawasan kolonial. Tokoh adat dan tokoh agama yang sebelumnya memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat nagari dijadikan objek kontrol, baik melalui pembatasan kewenangan maupun intimidasi, sehingga ruang gerak mereka semakin terbatas.

Dengan demikian, Perang Kamang berkontribusi pada melemahnya otonomi nagari dalam sistem kolonial. Struktur pemerintahan adat yang semula berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan dan pengelolaan kehidupan sosial masyarakat semakin terpinggirkan. Otonomi nagari secara perlahan digantikan oleh sistem kekuasaan kolonial yang bersifat sentralistik, di mana keputusan-keputusan strategis lebih banyak ditentukan oleh kepentingan pemerintah kolonial daripada aspirasi masyarakat setempat.²⁶ Selain dampak struktural tersebut, Perang Kamang juga meninggalkan dampak psikologis yang mendalam bagi masyarakat Kamang. Pengalaman kekerasan, penangkapan, pembunuhan, serta intimidasi aparat

²⁵ Hayati, Risa. *Kedudukan Mamak Dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik Menurut Perspektif Hukum Islam "Analisis Terhadap Pergeseran Kewenangan Paman Sebagai Hakam Dalam Hukum Keluarga*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019. Hlm 15-30

²⁶ Rahma, Ayu. "Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma Dan Literasi Sejarah Di Bukittinggi, 1973-2018." *Humanitis: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis* 1.4 (2023): Hlm 536-551.

kolonial menciptakan trauma individu dan trauma kolektif. Trauma ini tidak berhenti pada generasi yang mengalami langsung peristiwa tersebut, tetapi diwariskan secara lintas generasi melalui ingatan sosial, cerita keluarga, dan sikap kehati-hatian terhadap kekuasaan. Dalam konteks ini, trauma Perang Kamang menjadi bagian dari memori historis masyarakat Kamang yang terus memengaruhi cara mereka memaknai masa lalu dan berhadapan dengan otoritas hingga masa kini.

Trauma sosial yang ditinggalkan oleh Perang Kamang 1908 terdapat jelas dalam sikap kehati-hatian masyarakat Kamang terhadap kekuasaan eksternal, terutama kekuasaan yang bersifat memaksa dan represif. Pengalaman kekerasan kolonial membentuk pola perilaku kolektif yang cenderung menghindari konfrontasi langsung. Sikap waspada ini tidak hanya muncul dalam hubungan masyarakat dengan aparat kolonial pada masa itu, tetapi juga berlanjut dalam relasi masyarakat dengan otoritas di masa-masa berikutnya.

Dalam beberapa kasus, trauma tersebut diwujudkan dalam sikap diam dan keengganan masyarakat untuk membicarakan perlawanan secara terbuka. Narasi tentang Perang Kamang sering kali disampaikan secara terbatas, bahkan tersirat, melalui simbol, kiasan, dan petatah-petitih adat. Cara penyampaian ini menjadi mekanisme perlindungan sosial untuk menjaga keselamatan sekaligus mempertahankan ingatan sejarah tanpa harus berhadapan secara langsung dengan kekuasaan yang dianggap mengancam. Dalam jangka panjang, Perang Kamang membentuk ingatan kolektif masyarakat Kamang yang berfungsi sebagai sumber identitas dan kesadaran sejarah. Peristiwa ini dikenang sebagai simbol perlawanan

terhadap ketidakadilan dan penindasan kolonial, serta sebagai pengingat akan penderitaan dan pengorbanan masyarakat nagari. Ingatan kolektif tersebut tidak hanya merekam aspek kekerasan, tetapi juga menekankan nilai keberanian, solidaritas, dan keteguhan dalam mempertahankan martabat adat. Ingatan tentang Perang Kamang hidup dan dipelihara melalui tradisi lisan, cerita keluarga, serta narasi lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.²⁷ Proses pewarisan ingatan ini menjadikan Perang Kamang sebagai bagian integral dari memori sosial masyarakat Kamang. Dengan demikian, ingatan kolektif tidak hanya berfungsi sebagai catatan masa lalu, tetapi juga sebagai landasan kultural yang memengaruhi cara masyarakat memaknai sejarah, membangun identitas kolektif, dan bersikap terhadap kekuasaan hingga masa kini.

Meskipun secara militer rakyat Kamang mengalami kekalahan, Perang Kamang 1908 tetap dimaknai sebagai bentuk keberanian kolektif dan pembelaan terhadap martabat nagari. Kekalahan tersebut tidak dipahami semata sebagai kegagalan, melainkan sebagai wujud perlawanan moral terhadap kebijakan kolonial yang dianggap tidak adil dan menindas. Dalam perspektif masyarakat Kamang, nilai keberanian dan pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa ini justru menjadi simbol kehormatan dan keteguhan dalam mempertahankan hak-hak adat. Ingatan kolektif terhadap Perang Kamang berperan penting dalam pembentukan identitas sosial dan kesadaran sejarah masyarakat Kamang. Peristiwa ini dikenang sebagai tonggak perlawanan yang menegaskan posisi masyarakat

²⁷ Ibid, Hlm 560.

nagari sebagai subjek sejarah, bukan sekadar objek kekuasaan kolonial. Nilai-nilai moral seperti keadilan, solidaritas, keberanian, dan semangat kebersamaan diwariskan melalui cerita lisan dan narasi lokal, sehingga membentuk kerangka etis dalam kehidupan sosial masyarakat Kamang hingga generasi berikutnya. Secara keseluruhan, dampak Perang Kamang 1908 bersifat multidimensional dan berjangka panjang. Peristiwa ini tidak hanya berdampak pada aspek militer dan politik, tetapi juga menyentuh ranah sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Perubahan relasi kekuasaan antara masyarakat nagari dan pemerintah kolonial memperlihatkan pergeseran dari otonomi adat menuju kontrol kolonial yang lebih ketat dan sistematis.

Dalam jangka panjang, Perang Kamang membentuk pola sikap, memori, dan identitas masyarakat Kamang dalam memaknai kekuasaan dan sejarah. Ingatan kolektif tentang peristiwa ini berfungsi sebagai pengingat akan pengalaman penindasan sekaligus sebagai sumber pembelajaran historis. Dengan demikian, Perang Kamang 1908 tidak hanya menjadi peristiwa masa lalu, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran sejarah yang terus hidup dan memengaruhi dinamika sosial budaya masyarakat Kamang hingga masa berikutnya. Dengan demikian, Perang Kamang 1908 tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa konflik bersenjata antara rakyat dan pemerintah kolonial, melainkan sebagai pengalaman sejarah yang membekas secara mendalam dalam struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Kamang. Peristiwa ini membentuk perubahan mendasar dalam cara masyarakat mengatur kehidupan nagari, berinteraksi dengan kekuasaan, serta memaknai posisi mereka dalam sistem kolonial yang menekan.

Dari aspek sosial dan ekonomi, Perang Kamang memicu disrupsi berkepanjangan terhadap kehidupan agraris dan tatanan adat masyarakat. Gangguan terhadap sistem pertanian, melemahnya peran lembaga adat, serta meningkatnya tekanan ekonomi akibat kebijakan kolonial menunjukkan bahwa dampak perang tidak berhenti ketika konflik berakhir. Sebaliknya, perang justru membuka fase baru yang ditandai dengan ketidakstabilan sosial dan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap struktur kolonial. Dalam dimensi budaya dan psikologis, Perang Kamang meninggalkan ingatan kolektif dan trauma sosial yang diwariskan lintas generasi. Ingatan tersebut hidup dalam tradisi lisan, narasi keluarga, serta simbol-simbol kultural yang membentuk identitas masyarakat Kamang. Melalui ingatan ini,

Perang Kamang dimaknai tidak hanya sebagai kisah penderitaan, tetapi juga sebagai simbol keberanian, perlawanan, dan pembelaan terhadap martabat nagari. Oleh karena itu, dampak multidimensional inilah yang menjadikan Perang Kamang 1908 sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah lokal Minangkabau. Peristiwa ini tidak hanya memiliki signifikansi historis dalam konteks perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, tetapi juga berperan dalam membentuk kesadaran sejarah, nilai-nilai sosial, dan identitas kolektif masyarakat Minangkabau hingga masa berikutnya. Sebagai sumber refleksi untuk memahami dinamika sosial dan budaya masyarakat di masa kini.²⁸

²⁸ Syafrina, Yelda, And Ridho Bayu Yefterson. *Sejarah Indonesia Kontemporer Sumatera Barat Masa Perang Kemerdekaan*. Deepublish, 2023. Hlm 30